



Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumsel

Azila Ferasta Putri¹, Kiagus Zainal Arifin², M. Husni Mubarak³

^{1,2}Progdi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Corresponding Author: mhusnimubarak@polsri.ac.id

Diterima: September 2023; Direvisi: November 2023; Dipublikasikan: Desember 2023

Abstract This study aimed to examine and analyze the effect of implementation budget goal clarity, accounting controls, and reporting system on the performance accountability of government. This research uses quantitative research using primary data. The primary data is a questionnaire that has been distributed to 97 respondents in Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatera. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 29 program. The results of the study shows that budget goal clarity, accounting controls, and reporting systems affect performance accountability.

Keywords: Accountability; Performance of Government Agencies; Reporting System

Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menjabarkan hasil dari kejelasan target anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kajian ini mengimplementasikan jenis pengkajian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut adalah kuesioner yang telah didistribusikan kepada 97 responden di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kajian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dukungan program SPSS versi 29. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kejelasan target anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kinerja Instansi Pemerintah; Sistem Pelaporan

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggambarkan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas lembaga untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala yang terdiri dari bagian yang menggambarkan suatu kesatuan ialah perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Rahayu & Yudi, 2021). Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun berlandaskan beberapa jenjang ialah penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja disusun berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Selanjutnya dijalankan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerja dapat diketahui dan kemudian digambarkan dalam kerangka laporan kinerja instansi pemerintah.

Berlandaskan hasil LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bahwa ada persoalan dalam pelaksanaan kinerja yaitu adanya kebijakan *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) tahun 2022. Dari adanya prosedur tersebut mengakibatkan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tidak mencapai hasil yang tertinggi. Dalam hal ini, persoalan yang dirasakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran memengaruhi efektivitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja mereka. Ketidakmampuan untuk mencapai sasaran yang tertinggi juga memperlihatkan kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Salah satu tantangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni kejelasan target anggaran. Kejelasan target anggaran akan mendukung tenaga kerja untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan, dimana dengan memahami target anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya target anggaran yang jelas, maka akan memudahkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam bentuk untuk meraih tujuan-tujuan dan target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Kajian (Anisa & Haryanto, 2022) mengemukakan bahwa kejelasan target anggaran tidak berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kajian (Aprilianti dkk., 2020) mengemukakan bahwa kejelasan target anggaran berdampak negatif dan tidak relevan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kajian dari (Febrianti & Yuhertiana, 2021) dan (Rahayu & Yudi, 2021) mengemukakan bahwa kejelasan target anggaran berdampak positif dan relevan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tantangan berikutnya ialah pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi juga berguna sebagai satu kesatuan dalam meraih akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan mendukung pemerintah bisa menjalankan ketetapan yang semakin baik, menyusun aktivitas dengan lebih efisien, bisa mengasumsikan anggaran dan keuntungan, keberhasilan dan menetapkan alternatif terbaik dalam setiap fenomena dan masalah sehingga bisa mengoptimalkan kinerja (Septiyani dkk., 2020). Hasil evaluasi AKIP Pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sumatera selatan dikatakan rekomendasi

untuk melaksanakan pembaruan ialah membenahi mekanisme dan prosedur pengendalian yang mencukupi dalam penyusunan laporan kinerja, agar laporan kinerja menyampaikan Analisa atau informasi yang mencukupi serta data yang akurat dan bertaraf atas target dan capaian kinerja yang diberikan. Kajian (Anisa & Haryanto, 2022), (Septiyani dkk., 2020), dan (Hayani & Julita, 2021) mengemukakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan relevan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut (Hidayat dkk., 2021) mengemukakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tantangan terakhir yang mampu menciptakan terbentuknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ialah sistem pelaporan. Sistem pelaporan bermanfaat untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam implementasi anggaran yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pelaporan yang baik yang mampu memberikan informasi secara terbuka tentang ketentuan yang dibuat oleh pemerintah selama masa tertentu dan mengetahui serta mengontrol kinerja pemerintah dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sumatera selatan butuh melakukan perbaikan dalam membentuk laporan kinerja yang berisi analisa kendala dan persoalan dalam pencapaian kinerja. Menjalankan rekomendasi pembaruan peningkatan kualitas kinerja yang menyatakan pada tugas dan fungsi masing-masing divisi dalam mengkoordinasikan sistem pelaporan kinerja. Kajian (Anisa & Haryanto, 2022), (Septiyani dkk., 2020), dan (Aprilianti dkk., 2020) mengemukakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan relevan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan kejadian yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut dan adanya research gap dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Apakah Kejelasan Target Anggaran berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan? 2) Apakah Sistem Pelaporan berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan? 3) Apakah Pengendalian Akuntansi berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan? 4) Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan target anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem

pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berlandaskan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, “Akuntabilitas kinerja adalah bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan implementasi program dan kegiatan yang telah diberikan para pemegang keputusan dalam upaya meraih sasaran lembaga secara terukur dengan target yang telah ditentukan melalui laporan kinerja instansi yang dibentuk secara periodik”.

Akuntabilitas kinerja ini dijalankan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang berarti ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memperlihatkan jenjang pencapaian target atau tujuan yang telah ditentukan dengan meninjau indeks masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan pengaruh (*impact*).

Kejelasan Target Anggaran

Anggaran ialah penjelasan menyangkut perkiraan kinerja yang ingin diraih selama periode waktu tertentu yang digambarkan dalam ukuran finansial Mardiasmo (2018:75). Sehingga kejelasan target anggaran berarti sejauh mana tujuan anggaran ditentukan secara jelas dan dijabarkan sehingga mampu dipahami oleh instansi yang bertanggung jawab atas pencapaian target anggaran tersebut Mulyadi dkk., (2018).

Pengendalian Akuntansi

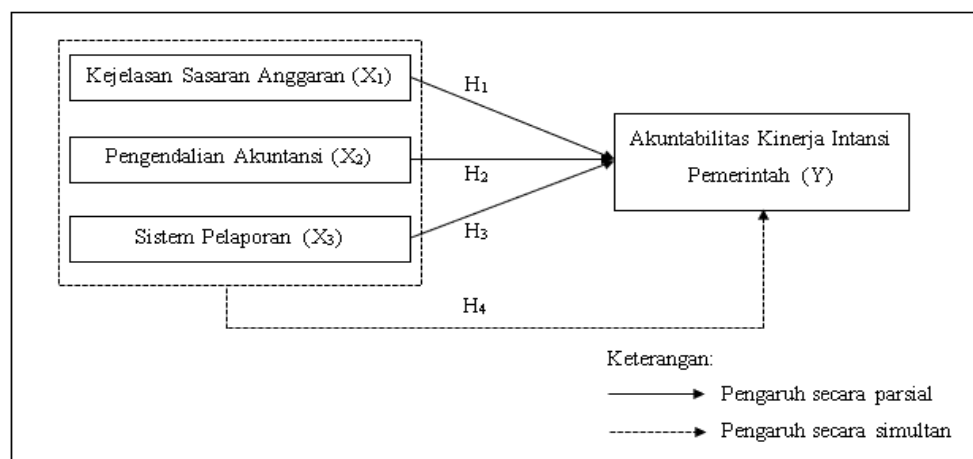
Dalam hal melindungi aset lembaga dan memastikan keakuratan data akuntansi, terdapat serangkaian sistem pengendalian internal yang disebut pengendalian akuntansi. Sistem ini mencakup struktur organisasi, prosedur, dan pengukuran Mulyadi (2016:129). Sementara menurut Paramitha (2016) mengemukakan bahwa pengendalian akuntansi yakni prosedur untuk mempengaruhi orang lain dalam perusahaan supaya efektif meraih tujuan perusahaan melalui target tertentu.

Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan memiliki arti sebagai suatu metode pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran informasi yang berguna membuat kepentingan dan menilai kerja organisasi. Sistem adalah suatu proses yang dijalankan sejalan dengan paradigma teratur untuk melakukan kegiatan inti Mulyadi (2016:4).

Yang kami maksud dengan “pelaporan kinerja” adalah proses dimana lembaga pemerintah melaporkan seberapa baik kinerja mereka sepanjang tahun fiskal dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Resmi Kinerja Instansi (LAKIP) menyusun laporan kinerja beberapa instansi pemerintah. Dari kerangka tersebut dapat ditulis beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kejelasan Target Anggaran berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H2 : Pengendalian Akuntansi berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H3 : Sistem Pelaporan berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H4 : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Secara Simultan Berdampak Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dimana populasi yang dipilih yaitu seluruh tenaga kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Sampel 97 tenaga kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pembagian kuesioner diberikan kepada tenaga kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kriteria responden yaitu pejabat eselon II (kepala kantor wilayah), pejabat eselon III (kepala bidang/bagian), pejabat eselon IV (kepala sub bagian/ seksi), dan staff pada divisi administrasi. Kuesioner memuat tentang pernyataan yang harus diisi oleh responden yang memanfaatkan lima Skala Likert, sebagai berikut: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju.

Uji Kualitas Data

Berlandaskan hasil kajian dipahami bahwa variabel Kejelasan Target Anggaran memiliki kisaran korelasi antara 0,418 sampai dengan 0,730 yang membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan untuk mengukur Kejelasan Target Anggaran diartikan Valid. Kemudian variabel Pengendalian Akuntansi berada pada kisaran korelasi antara 0,391 sampai 0,805 yang membuktikan masing-masing pertanyaan diartikan valid. Begitu juga variabel Sistem Pelaporan memiliki korelasi antara 0,675 sampai 0,899 yang membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diartikan valid. Kemudian variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada kisaran 0,763 sampai 0,915 yang membuktikan masing-masing pernyataan diartikan valid.

Variabel Kejelasan Target Anggaran memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,784, artinya pernyataan tentang Kejelasan Target Anggaran sebanyak 13 item reliable. Menurut Cronbach's Alpha, pernyataan tentang Pengendalian Akuntansi berjumlah 9 item yang dapat diandalkan dengan skor 0,743. Kedua, Cronbach's Alpha untuk Sistem Pelaporan sebesar 0,902 yang menunjukkan bahwa terdapat 6 hal yang dapat dipercaya dalam pernyataan sistem. Dengan Cronbach's Alpha sebesar 0,934, pernyataan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 8 hal yang dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05662083
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,092
	Negative	-,064
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,054
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d Sig.		,054
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,048
	Upper Bound	,060

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami nilai asymp.sig sebesar $0,54 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

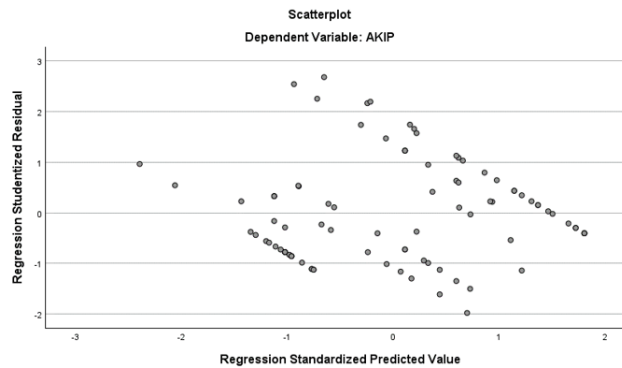
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,721	1,181		3,998	<,001		
	KSA	,052	,024	,098	2,199	,030	,576	1,737
	PA	,279	,035	,353	8,052	<,001	,599	1,669
	SP	,671	,044	,644	15,112	<,001	,633	1,581

a. Dependent Variable: AKIP

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan data kajian ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas, hal ini dapat dibuktikan dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Variabel Kejelasan Target Anggaran mempunyai nilai tolerance 0,576 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) 1,737. Pengendalian Akuntansi mempunyai nilai tolerance 0,599 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) 1,669. Kemudian Sistem Pelaporan mempunyai nilai tolerance 0,633 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) 1,581. Artinya tidak terjadi multikolinearitas, karena untuk semua variabel nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Selaras dengan gambar 2. pada pola scatter plot menunjukkan pola yang tersebar secara acak dan tidak merangkai paradigma tertentu yang jelas serta tersebar disekitar angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut artinya uji heteroskedastisitas pada bentuk regresi sudah baik dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

		<u>Coefficients^a</u>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,721	1,181		3,998	<,001
	KSA	,052	,024	,098	2,199	,030
	PA	,279	,035	,353	8,052	<,001
	SP	,671	,044	,644	15,112	<,001

a. Dependent Variable: AKIP

Rumus regresi yang dihasilkan dari uji regresi adalah $AKIP = 4,721 + 0,052 KSA + 0,279 PA + 0,671 SP + e$

Berdasarkan tabel 4, variabel Kejelasan Target Anggaran berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tingkat relevansi $0,030 > 0,05$, namun t-tabel = 1,98729 dan t-hitung = 2,199. Oleh karena itu, kami menerima H1. Akuntabilitas kinerja variabel Pengendalian Akuntansi pada instansi pemerintah dipengaruhi oleh temuan uji statistik t yang mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan t hitung sebesar 8,052 $>$. tabel t=1,98729. Hal ini membuktikan bahwa H2 benar. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh temuan uji t statistik pada variabel sistem pelaporan, dengan ambang batas signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan t hitung sebesar 15,112 $>$. tabel t=1,98729. Hal ini membuktikan bahwa H3 diterima.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,948 ^a	,899	,895	,872

a. Predictors: (Constant), SP, PA, KSA

b. Dependent Variable: AKIP

Berlandaskan hasil dari tabel 6 dapat dipahami koefisien determinasi (R²) 0,896. Artinya 89% variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat digambarkan oleh ketiga variabel bebas yaitu Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Target Anggaran, Sedangkan 11% persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil Uji T

Tabel 6. Hasil Uji T

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,721	1,181		3,998	<,001
	KSA	,052	,024	,098	2,199	,030
	PA	,279	,035	,353	8,052	<,001
	SP	,671	,044	,644	15,112	<,001

a. Dependent Variable: AKIP

Untuk menentukan nilai t-hitung pada tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $92 - 3 - 1 = 88$ sehingga didapat t-tabel sebesar 1,98729 (n yakni jumlah data dan k yakni jumlah variabel independent). Ditinjau dari tabel, secara parsial X1 mempunyai nilai t hitung $2,199 > t_{tabel} - 1,98729$ dan nilai relevansi $0,030 < \text{tingkat relevansi } 0,05$ artinya H1 Diterima. X2 mempunyai t hitung $8,052 > \text{dari } t \text{ tabel } 1,98729$ dan nilai relevansi $0,001 < \text{dari } \text{tingkat relevansi } 0,05$ artinya H2 Diterima. X3 mempunyai t hitung $15,112 > \text{dari } t \text{ tabel } 1,98729$ dan nilai relevansi $0,001 < \text{dari } \text{relevansi } 0,05$ artinya H3 Diterima. Artinya Kejelasan Target Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berdampak positif dan relevan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	593,578	3	197,859	260,505	<,001 ^b
	Residual	66,838	88	,760		
	Total	660,416	91			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), SP, PA, KSA

Berlandaskan hasil uji F dengan nilai F hitung 260,505 dengan relevansi pada tingkat 0,001. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat relevansi 5% ($\alpha=0,05$) dan F hitung 260,505 > F tabel 2,71 artinya Kejelasan Target Anggaran Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama (simultan) berdampak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kejelasan Target Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan uraian hasil yang diperoleh, diketahui bahwa nilai t-tabel 1,98729. karena t-hitung > t-tabel (2,199 > 1,98729) dengan nilai signifikan 0,030 < 0,05 artinya variabel independen Kejelasan Target Anggaran (X1) berdampak terhadap variabel terikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), maka dapat dipahami hipotesis 1 (H1) diterima, artinya Kejelasan Sasaran Anggaran berdampak positif dan relevan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang akurat maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka meraih tujuan yang telah ditentukan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Kajian ini selaras dengan Febrianti & Yuhertiana (2021) dalam kajiannya mengemukakan Kejelasan Target Anggaran berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. Selaras dengan kajian Rahayu & Yudi (2021) yang mengemukakan Kejelasan Sasaran Anggaran berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi. Berasaskan hasil kajian hipotesis pertama mampu diartikan bahwa Kejelasan Target Anggaran berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Semakin jelas target anggaran maka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berlandaskan uraian yang diperoleh, diketahui bahwa nilai t-tabel 1,98729. karena t-hitung $>$ t-tabel ($8,024 > 1,98729$) dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ artinya variabel bebas Pengendalian Akuntansi (X2) mempunyai dampak terhadap variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), maka mampu dipahami hipotesis 2 (H2) diterima, artinya Pengendalian Akuntansi memiliki dampak positif dan relevan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan meningkatnya pengendalian akuntansi maka akan berdampak pada meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kajian ini selaras dengan kajian Anisa & Haryanto (2022) yang mengemukakan Pengendalian Akuntansi berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang. Selaras dengan kajian Septiyani dkk., (2020), dan Hayani & Julita (2021) mengemukakan Pengendalian Akuntansi berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berasaskan hasil pengujian hipotesis kedua mampu diartikan Pengendalian Akuntansi berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Semakin baik pengendalian akuntansi, mampu mengurangi tingkat kesalahan (tidak sengaja) atau ketidakbenaran (sengaja) sehingga dapat mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berlandaskan uraian hasil yang diperoleh, diketahui nilai t-tabel 1,98729. karena t-hitung $>$ t-tabel ($15,112 > 1,98729$) dengan nilai relevan $0,001 < 0,05$ artinya variabel bebas Sistem Pelaporan (X2) berdampak terhadap variabel terikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), maka mampu dipahami hipotesis 3 (H3) diterima, artinya Sistem Pelaporan berdampak positif dan relevan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Pelaporan berguna bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk memperhatikan dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditentukan.

Kajian ini selaras dengan Anisa & Haryanto (2022) mengemukakan Sistem Pelaporan berdampak positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang. Selaras dengan Septiyani dkk., (2020), dan Aprilianti dkk., (2020) mengemukakan bahwa Sistem Pelaporan berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berasaskan hasil pengujian hipotesis ketiga mampu diartikan Sistem Pelaporan berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Pengaruh Kejelasan Target Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berlandaskan uji F bahwa nilai F-hitung 260,505 dan signifikansi 0,001. Artinya yakni F hitung $260,505 > F\text{-tabel } 2,71$ sehingga mampu diartikan secara simultan Kejelasan Target Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama berdampak pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Hal ini juga dibantu atas hasil uji determinasi diketahui nilai R Square sebesar 0,899. Artinya besarnya dampak yang disajikan oleh variabel Kejelasan Target Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan adalah 89%. Sedangkan sisanya 11% berdampak karena variabel lain.

SIMPULAN

Dari hasil kajian ini mampu disimpulkan bahwa kejelasan target anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan). Kesimpulan dalam bagian ini telah akurat dan memuat relevansi dengan pembahasan serta tujuan kajian.

KETERBATASAN DAN SARAN

Saran untuk peneliti berikutnya: 1) diharapkan mampu menambahkan variabel lain yang mempunyai kemungkinan untuk berdampak terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti menambahkan variabel bebas atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk mendapat hasil yang berbeda. 2) Peneliti berikutnya mampu memperbanyak jumlah sampel penelitian, supaya hasil kajian yang diperoleh mampu menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara global.

Dari hasil kajian ini mampu menjadi pertimbangan dan masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pada setiap pegawai yang ada. Dimana kejelasan target anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mampu mengoptimalkan akuntabilitas kinerja, maka diharapkan para pegawai akan mengalami peningkatan yang semakin baik serta mampu meningkatkan kerjanya dalam meraih visi dan misi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
- Faturahman, F. (2020). Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 67–80.
- Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146.
- Hariato, D., & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139.
- Hayani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93.
- Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.
- Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101.
- Paramitha, I. (2016). Gayatri.(2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2457–2479.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(2), 126–135.

Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.